

## **II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Koperasi**

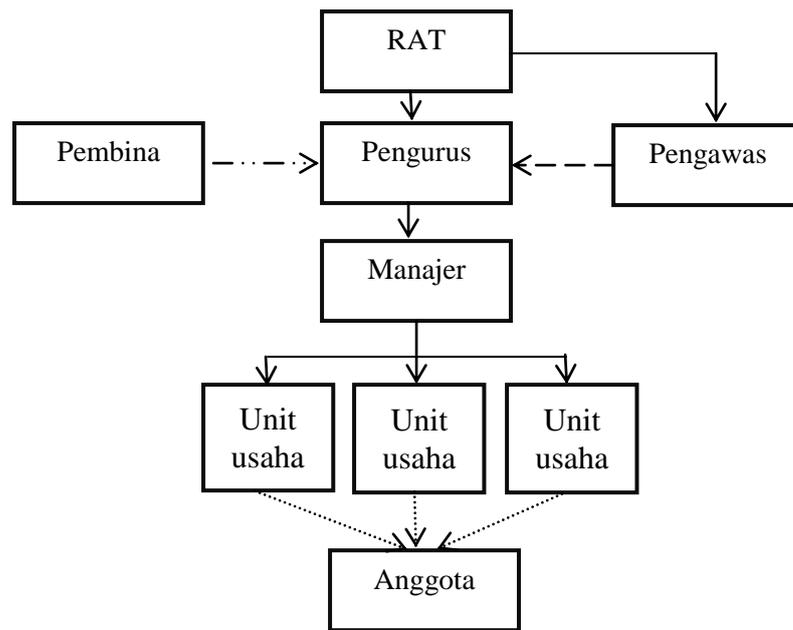
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi juga berasaskan kekeluargaan yang memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi memiliki prinsip yang menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:(1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; (2) pengelolaan dilakukan secara demokratis; (3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-

masing anggota; (4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan (5) kemandirian. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, koperasi memiliki fungsi dan peran dalam pendiriannya, meliputi:

- (1) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,
- (2) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat,
- (3) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya, dan
- (4) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Menurut Sitio dan Tamba (2001), koperasi membutuhkan struktur untuk menjalankan organisasi dan usahanya. Pada Gambar 1 dijelaskan bahwa struktur dan tatanan manajemen koperasi dapat dirunut berdasarkan perangkat organisasi koperasi, yaitu rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Rapat anggota merupakan suatu wadah dari para anggota koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi untuk membicarakan kepentingan organisasi maupun usaha koperasi dalam rangka mengambil suatu keputusan.



Gambar 1. Struktur internal koperasi secara umum

Keterangan :   
 ———> = garis komando  
 ---> = garis pengawasan  
 -.-> = garis pembinaan  
 .....> = garis pelayanan

Sumber : Sitio dan Tamba, 2001 (data diolah)

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas untuk: (1) mengelola organisasi koperasi dan usahanya, (2) mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi, (3) menyelenggarakan rapat anggota, dan (4) mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Perangkat koperasi berikutnya adalah pengawas.

Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Perangkat koperasi yang terakhir adalah pengelola. Pengelola koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh

pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional. Seluruh unit usaha koperasi dikelola oleh mereka yang diberikan tanggungjawab sebagai pengelola.

Kinerja dari suatu koperasi ditentukan oleh tingkat partisipasi dari anggotanya. Anggota merupakan salah satu pihak yang menentukan keberhasilan dari suatu koperasi. Kedudukan anggota dalam koperasi sangatlah penting karena anggota sebagai pemilik (*owner*) dan juga sebagai pelanggan (*user*) bagi koperasi. Koperasi hanya dapat tumbuh dan berkembang apabila mendapat dukungan dari anggotanya, baik dukungan melakukan transaksi, kehadiran dalam rapat anggota, maupun dalam penyertaan modal.

Koperasi membutuhkan modal untuk menjalankan organisasi dan usaha koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 41, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah dari anggota maupun dari masyarakat, sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari: (1) anggota koperasi, (2) koperasi lainnya dan/atau anggotanya, (3) bank dan lembaga keuangan lainnya, (4) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta (5) sumber lain yang sah. Menurut Subandi (2010), penyertaan modal dalam koperasi pada dasarnya merupakan suatu investasi, dimana kepadapemilikinya harus diberikan bukti keikutsertaannya dalam bentuk saham.

## 2. Keberhasilan Koperasi

Menurut Hanel (1989), keberhasilan dari suatu koperasi dapat dilihat melalui tiga pendekatan yang biasa disebut dengan pendekatan *tripartite*. Evaluasi keberhasilan koperasi berdasarkan pendekatan *tripartite* adalah (1) keberhasilan koperasi menjadi suatu badan usaha, (2) keberhasilan koperasi dalam kontribusi terhadap pembangunan daerah, dan (3) keberhasilan koperasi mensejahterakan anggota. Dari sisi usaha koperasi, maka koperasi akan mencapai keberhasilan apabila terdapat efisiensi koperasi, efektifitas koperasi, dan produktivitas koperasi. Dari sisi pembangunan daerah, koperasi akan mencapai keberhasilan apabila koperasi sudah turut menyejahterakan masyarakat sekitar dan berkontribusi dalam kegiatan pembangunan, sedangkan dari sisi anggota, koperasi dapat mencapai keberhasilan apabila terdapat efek ekonomis, efek harga, dan efek biaya yang dapat menyejahterakan anggota.

Menurut Subandi (2010), koperasi merupakan sebuah badan usaha yang kelahirannya dilandasi oleh pikiran-pikiran sekumpulan orang, sehingga koperasi tidak boleh terlepas dari efisiensi usahanya walaupun tujuan utamanya adalah menyejahterakan anggota. Dalam menyejahterakan anggota, koperasi memberikan manfaat ekonomi, baik manfaat ekonomi tunai, maupun manfaat ekonomi diperhitungkan. Ukuran manfaat ekonomi dihubungkan dengan teori efisiensi, efektivitas, serta waktu terjadinya transaksi atau diperolehnya manfaat ekonomi. Efisiensi merupakan penghematan input yang diukur dengan cara membandingkan

input anggaran atau yang seharusnya dengan input realisasi atau yang sesungguhnya. Apabila input yang sesungguhnya lebih kecil daripada input yang seharusnya, maka akan terjadi efisiensi. Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau yang seharusnya dengan output realisasi atau yang sesungguhnya.

Keberhasilan koperasi dari unit usahanya dapat dilihat dari tingkat kesehatan keuangan koperasi melalui analisis rasio keuangan koperasi. Perhitungan hasil usaha koperasi harus dapat menunjukkan usaha yang berasal dari anggota maupun bukan anggota. Alokasi pendapatan dan beban kepada anggota dan bukan anggota pada perhitungan hasil usaha dilakukan berdasarkan perbandingan manfaat yang diterima anggota dan bukan anggota (Subandi, 2010).

Menurut Hendar dan Kusnadi (1999), koperasi di negara berkembang dianggap perlu dihadirkan dalam rangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, melalui pembangunan koperasi. Pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia guna mencapai kesejahteraan anggotanya. Tujuan pembangunan koperasi di Indonesia adalah

menciptakan keadaan masyarakat, khususnya anggota koperasi, agar mampu mengurus dirinya sendiri (*self help*).

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Tahapan pembangunan koperasi di negara berkembang, terdiri dari: (1) pemerintah mendukung perintisan pembentukan organisasi koperasi, (2) melepaskan ketergantungan kepada sponsor dan pengawasan teknis, manajemen, dan keuangan secara langsung dari pemerintah dan atau organisasi yang dikendalikan oleh pemerintah, dan (3) perkembangan koperasi sebagai organisasi koperasi yang mandiri dan mampu turut berpartisipasi dalam memajukan pembangunan di negara berkembang. Tujuan pokok koperasi harus benar-benar mengabdikan untuk kepentingan anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pembangunan koperasi di Indonesia dihadapkan pada dua masalah pokok, yaitu masalah internal dan masalah eksternal (Hanel, 1989).

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2012), penilaian tingkat kontribusi koperasi terhadap pembangunan dapat dilihat dari ketaatan koperasi membayar pajak, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, dan tingkat upah karyawan. Pajak yang dibayarkan koperasi kepada pemerintah daerah akan digunakan untuk melakukan pembangunan. Ketika koperasi membayar pajak dengan tepat waktu, maka koperasi dianggap sudah berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Menurut UU No 25 Tahun 1992, tujuan koperasi adalah menyejahterakan anggota

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Penyerapan tenaga kerja yang dilakukan koperasi dari masyarakat sekitar, menandakan koperasi telah turut berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Selain itu, upah yang diberikan koperasi terhadap karyawan juga merupakan indikator kontribusi koperasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Keberhasilan dari suatu koperasi juga dilihat dari sisi anggota. Tujuan utama koperasi adalah menyejahterakan anggotanya, dimana diperlukan partisipasi dari setiap anggota untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Hanel (1989) membagi partisipasi anggota koperasi menjadi dua kelompok, yaitu partisipasi anggota sebagai pemilik dan partisipasi anggota sebagai pelanggan. Partisipasi anggota sebagai pemilik sering disebut sebagai partisipasi kontributif, karena para anggota berpartisipasi dengan memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan koperasi dalam bentuk keuangan, misalnya membayar simpanan-simpanan, pembentukan cadangan, dan penyertaan modal, sedangkan partisipasi anggota sebagai pelanggan sering disebut sebagai partisipasi insentif, yaitu para anggota memanfaatkan berbagai potensi atau jasa pelayanan yang diberikan koperasi untuk menunjang berbagai kepentingannya, seperti pembelian, penjualan, kredit simpan pinjam, produksi, dan lain-lain. Semakin besar modal yang terkumpul, maka semakin besar pula peluang untuk memperluas jangkauan usaha koperasi. Jumlah manfaat ekonomi yang diterima anggota juga berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota.

### 3. Kinerja Koperasi sebagai Badan Usaha

Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu koperasi adalah kinerja koperasi menjadi suatu badan usaha. Pengukuran kinerja koperasi sebagai suatu badan usaha dapat dilihat dari seberapa besar tingkat keuntungan yang diperoleh koperasi saat menjalankan unit usahanya. Pengukuran tingkat keuntungan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis laporan keuangan koperasi yang terjadi selama satu periode tertentu. Analisis laporan keuangan adalah penelaahan atau menguraikan informasi menjadi lebih detail, atau mempelajari hubungan-hubungan dan tendensi (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan, serta hasil operasi serta perkembangan koperasi yang bersangkutan (Sudarsono dan Edilius, 2005).

Menurut Rahardjo (1994), untuk menganalisis laporan keuangan pada dasarnya ada dua cara, yaitu :

- a. Membandingkan rasio sekarang (*present ratio*) dengan rasio-rasio dari waktu yang lalu (*ratio histories*) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari koperasi yang sama.
- b. Membandingkan rasio-rasio dari sebuah koperasi dengan rasio-rasio yang sejenis dari koperasi lain (yang sejenis) atau untuk waktu yang sama. Melalui perbandingan rasio tersebut akan diketahui apakah koperasi yang bersangkutan berada di atas rata-rata atau terletak di bawah rata-rata dalam aspek finansial.

Laporan keuangan sangat diperlukan oleh semua jenis koperasi. Koperasi membuat laporan keuangan untuk menentukan dan mengukur hubungan-hubungan antar pos-pos keuangan, sehingga koperasi mendapat perubahan dari masing-masing pos tersebut. Oleh karena itu, digunakan metode dan alat-alat analisis tertentu, yaitu dengan jalan memperbandingkan laporan koperasiantar periode, atau diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya, misalnya diperbandingkan dengan laporan keuangan yang dianggarkan, atau bahkan dengan laporan keuangan dari koperasi-koperasilainnya (Sudarsono dan Edilius, 2005).

Informasi yang didasarkan pada analisis keuangan mencakup penilaian keadaan keuangan koperasi, baik yang telah lampau, saat sekarang, dan ekspektasi masa depan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi setiap kelemahan dari keadaan keuangan yang dapat menimbulkan masalah di masa depan dan menentukan setiap kekuatan yang dapat digunakan. Disamping itu, analisis yang dilakukan oleh pihak luar koperasi dapat digunakan untuk menentukan tingkat kredibilitas atau potensi investasi (Muslich, 2003). Metode dan teknik analisis yang umum digunakan dalam analisis laporan keuangan adalah (Suharto dkk, 2005):

- a. Analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu metode dan teknik analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan untuk dua periode atau lebih dengan menunjukkan data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah, data relatif atau angka persen dari jumlah total, kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah, kenaikan atau

penurunan dalam angka persen, dan perbandingan yang dinyatakan dengan suatu rasio/nisbah.

- b. Trend atau kecenderungan mengenai posisi dan kemajuan untuk mengetahui keadaan keuangan koperasi, apakah menunjukkan keadaan yang stabil, naik, atau turun.
- c. Laporan dengan persentase per komponen, yaitu suatu metode analisis untuk mengetahui persentase masing-masing aktiva terhadap total aktiva, struktur permodalan dan komposisi perongkosan (beban-beban) dibandingkan dengan jumlah penjualannya.
- d. Analisis perubahan modal kerja, yaitu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja dalam periode akuntansi tertentu, melalui pengurangan dari modal kerja awal terhadap pengeluaran pribadi, ditambahkan dengan laba yang diperoleh.
- e. Analisis laporan arus kas (*cash flow statement analysis*), yaitu analisis untuk mengetahui sumber-sumber dan penggunaan uang kas selama periode akuntansi tertentu.
- f. Analisis rasio keuangan, yaitu suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individual atau gabungan dari kedua laporan tersebut.
- g. Analisis perubahan laba kotor (*gross profit analysis*), yaitu suatu metode analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor atas penjualan suatu koperasi dari beberapa periode akuntansi atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dianggarkan untuk periode yang sama.

- h. Analisis *break even*, yaitu suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh koperasi agar koperasi tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisis *break even* akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan

Analisis rasio keuangan adalah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi-laba secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. *Trend* atau tendensi adalah metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan koperasi, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, atau turun. Laporan dengan persentase per komponen atau *common size statement* adalah metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktiva. Selain itu, juga untuk mengetahui struktur permodalan dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya (Munawir, 2002).

Menurut Riyanto (2001), rasio keuangan dibagi menjadi tiga macam, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Rasio likuiditas adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas koperasi (*current ratio, quick ratio*), rasio solvabilitas adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar koperasi dibiayai dengan hutang (*total debt to equity ratio, total debt to total capital ratio*), rasio aktivitas adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas koperasi dalam mengerjakan sumber-sumber

dananya, rasio rentabilitas adalah rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan (*profit margin on sales*, *return on total assets*, *return on net worth*, dan lain sebagainya). Rasio-rasio tersebut tersebut dapat dibedakan lagi menjadi (Riyanto, 2001):

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, terdiri dari:

- (1) *Current Ratio*, yaitu rasio yang menunjukkan tingkat keamanan pinjaman jangka pendek dan kemampuan untuk membayar hutang-hutang tersebut.
- (2) *Quick Ratio*, yaitu kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa memerhatikan persediaan, karena persediaan memerlukan waktu relatif lama untuk dicairkan menjadi uang kas.
- (3) *Cash Ratio*, yaitu kemampuan membayar hutang lancar yang dimiliki koperasi yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dan bank (simpanan jangka pendek).

b. Rasio Solvabilitas

Rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi untuk membayar semua hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terdiri dari:

- (1) *Total Debt to Equity Ratio*, yaitu rasio yang menunjukkan berapa bagian dari setiap rupiah yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutangnya.
- (2) *Total Debt to Total Capital Ratio*, yaitu rasio yang menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang dibelanjakan dengan cara kredit, atau berapa bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang.

c. Rasio Rentabilitas (Profitabilitas)

Rasio rentabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki koperasi untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, terdiri dari:

- (1) *Return of Investment* (profitabilitas ekonomi), yaitu kemampuan menghasilkan laba dari keseluruhan modal (baik modal luar maupun modal sendiri) yang digunakan untuk menghasilkan laba.
- (2) *Return of Equity* (profitabilitas modal sendiri), yaitu kemampuan koperasi dengan modal sendiri (yang bekerja di dalamnya) untuk menghasilkan keuntungan.

Analisis trend adalah metode atau teknik analisis untuk mengetahui suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya merata (*smooth*). Analisis trend dapat menggunakan metode semi rata-rata, dimana data dibagi menjadi dua bagian, dan dihitung rata-rata pada setiap kelompok, lalu nilai perubahan trend dapat dihitung dengan rumus (Munawir, 2002):

$$b = \frac{(K2-K1)}{(\text{tahun dasar } K2 \text{ tahun dasar } K1)} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan: b = Nilai perubahan trend  
 K1 = Rata-rata data kelompok pertama  
 K1= Rata-rata data kelompok ke dua

Setelah diperoleh nilai perubahan trend, selanjutnya adalah merumuskan persamaan trend melalui persamaan (Munawir, 2002):

$$Y = a + bX \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan: Y = Nilai trend pada tahun X  
 a = Rata-rata pendapatan pada setiap kelompok  
 b = Nilai perubahan trend  
 X = Nilai skor trend pada setiap kelompok

#### 4. Kontribusi Koperasi terhadap Pembangunan

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2012), penilaian tingkat kontribusi koperasi terhadap pembangunan dapat dilihat dari ketaatan koperasi membayar pajak, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, dan tingkat upah karyawan. Ketaatan koperasi membayar pajak merupakan suatu bentuk partisipasi koperasi terhadap pembangunan daerah. Standar nilai yang diterapkan dalam analisis ketaatan koperasi membayar pajak, yaitu (Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 2013):

1. Membayar, lebih cepat dari waktu yang ditentukan (sangat baik)
2. Membayar, sesuai dengan waktu yang ditentukan (baik)
3. Membayar, terlambat  $\leq$  seminggu dari waktu yang ditentukan (cukup baik)
4. Membayar, terlambat  $>$  seminggu dari waktu yang ditentukan (kurang baik)
5. Tidak mebayar pajak pada tahun ini (tidak baik)

Rasio pertumbuhan penyerapan tenaga kerja menggambarkan seberapa besar koperasi berperan dalam penyerapan tenaga kerja di wilayah kerja

koperasi. Rasio tersebut dapat diukur dengan rumus (Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 2013) :

$$\text{Rasio Penyerapan TK} = \frac{\text{Jumlah TK thn ini} - \text{Jumlah TK thn sebelumnya}}{\text{Jumlah TK tahun sebelumnya}} \times 100 \% \dots\dots(3)$$

dan kriterianya adalah:

Rasio penyerapan TK Koperasi > 15,0%	(Sangat Baik)
Rasio penyerapan TK Koperasi 10,0% - 14,9%	(Baik)
Rasio penyerapan TK Koperasi 5,0% - 9,9%	(Cukup Baik)
Rasio penyerapan TK Koperasi 0,1% - 4,9%	(Kurang Baik)
Tidak ada penyerapan TK Koperasi	(Tidak Baik)

Rasio tingkat upah karyawan menggambarkan perbandingan antara besarnya upah karyawan rata-rata terhadap besarnya upah minimum yang berlaku. Rasio tingkat upah karyawan dapat dihitung dengan rumus (Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 2013) :

$$\text{Rasio Tingkat Upah Karyawan} = \frac{\text{Besar Upah karyawan rata-rata}}{\text{Besar upah minimum yang berlaku}} \times 100 \% \dots\dots(4)$$

dan kriterianya adalah:

Rasio tingkat upah karyawan > 200%	(Sangat Baik)
Rasio tingkat upah karyawan 151% - 200%	(Baik)
Rasio tingkat upah karyawan 101% - 150%	(Cukup Baik)
Rasio tingkat upah karyawan 81% - 100%	(Kurang Baik)
Rasio tingkat upah karyawan $\leq$ 80%	(Tidak Baik)

## 5. Usaha Ikan Tangkap

Menurut Daniel (2002), produksi ikan bersifat musiman, terutama pada ikan laut. Kecepatan angin juga mempengaruhi kegiatan ikan, karena besar tidaknya ombak disebabkan oleh tiupan angin. Aliran angin juga tergantung dari cuaca dan musim. Matahari akan terhalang saat cuaca mendung, sehingga ikan akan berada pada posisi yang lebih ke dasar

laut. Saat musim hujan, ikan laut cenderung lebih sedikit karena sanitasi air laut berkurang akibat air tawar yang masuk ke dalam laut sehingga ikan akan menuju ke tengah laut, ke dasar laut atau bersembunyi di karang. Faktor musim ini menyebabkan produksi ikan yang tidak konstan. Pada saat musim barat, produksi ikan cenderung sedikit, sedangkan pada saat musim barat, saat produksi ikan sangat melimpah, banyak yang tidak dimanfaatkan, sehingga menjadi busuk. Hal ini sangat merugikan bagi nelayan atau pengusaha.

Menurut Simanjuntak (2001), daerah penangkapan ikan bagi nelayan, juga tergantung pada besar kecilnya kapal, alat tangkap, dan jenis ikan laut yang akan ditangkap. Nelayan yang menggunakan kapal tanpa motor umumnya menangkap ikan laut di pinggir pantai sekitar pantai, sedangkan nelayan yang menggunakan kapal motor lebih kecil dari 5 GT akan menangkap ikan setelah kapal berlayar ke arah tengah laut sejauh 100 m dari pantai dan daerah penangkapan dengan rata-rata sejauh 5.760 m. Nelayan yang menggunakan kapal motor lebih besar dari 5 GT akan menangkap ikan setelah kapal bergerak ke tengah laut sejauh 500 m dari pantai dan daerah menangkap ikan rata-rata sejauh 30.000 m. Setiap kapal motor memerlukan anak buah kapal (ABK) dengan jumlah yang berbeda. Ada kapal motor yang hanya memerlukan tiga orang ABK, tetapi ada pula kapal motor yang memerlukan 20 orang ABK.

Menurut Effendi dan Oktariza (2006), jenis aset tetap bidang usaha perikanan untuk produksi ikan yaitu kapal, mesin, alat tangkap, dan alat bantu penangkapan. Biaya yang diperlukan untuk usaha perikanan terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Jenis biaya tetap usaha perikanan adalah surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), surat izin berlayar (pas biru), biaya perawatan kapal dan mesin alat tangkap, dan biaya penyusutan aset tetap. Selanjutnya, biaya variabel usaha perikanan adalah oli, solar/bensin, minyak tanah, es, garam, tenaga kerja, dan konsumsi saat melaut.

Menurut Mulyadi (2005), kelompok nelayan modern sudah menerapkan sistem bagi hasil. Kelompok nelayan ini terdiri dari juragan (pemilik kapal), nahkoda, kepala kamar mesin (KKM), dan anak buah kapal (ABK). Juragan merupakan nelayan yang memiliki sebuah kapal, yang digunakan secara bersama-sama dalam proses penangkapan ikan. Nahkoda adalah nelayan yang bertugas mengemudikan kapal dengan didasari oleh sertifikat nahkoda yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Kepala kamar mesin (KKM) adalah nelayan yang bertugas mengendalikan mesin pada kapal. Tidak semua kapal memiliki KKM, hanya kapal dengan mesin  $\geq 10$  GT yang memiliki KKM. Anak buah kapal (ABK) merupakan nelayan yang bertugas menangkap ikan, sehingga setiap kapal memerlukan lebih dari satu ABK. ABK yang dibutuhkan setiap kapal berbeda-beda, tergantung jenis alat tangkap yang digunakan. Pada

sistem bagi hasil, bagian yang dibagi adalah pendapatan setelah dikurangi dengan ongkos-ongkos eksploitasi yang dikeluarkan pada waktu beroperasi ditambah dengan ongkos penjualan hasil, meliputi ongkos bahan bakar, oli, es dan garam, dan biaya lain yang masih termasuk ongkos eksploitasi, seperti biaya reparasi alat dan *boat*.

Selanjutnya menurut Mulyadi (2005), persentase pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan dan mengacu pada peraturan daerah. Permasalahan dalam pembangunan perikanan didefinisikan sebagai segenap perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan kenyataan yang terjadi. Kondisi pembangunan perikanan Indonesia yang diinginkan adalah suatu pembangunan perikanan yang dapat dimanfaatkan sumberdaya perikanan beserta ekosistem perairannya untuk kesejahteraan umat manusia, terutama nelayan secara berkelanjutan.

## **6. Teori Pendapatan dan Pengeluaran**

Menurut Hernanto (1994), besarnya pendapatan yang akan diperoleh dari suatu kegiatan usahatani tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti luas lingkup pekerjaan, tingkat produksi, identitas juragan, dan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Dalam melakukan kegiatan usahatani, petani berharap dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi. Harga dan produktivitas merupakan sumber dari faktor ketidakpastian,

sehingga bila harga dan produksi berubah, maka pendapatan yang diterima nelayan juga berubah (Soekartawi, 1995).

Menurut Soekartawi (1995), pendapatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan usahatani dan pendapatan rumahtangga. Pendapatan merupakan pengurangan dari penerimaan dengan biaya total. Pendapatan rumahtangga adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usahatani ditambah dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan diluar usahatani. Pendapatan usahatani adalah selisih antara pendapatan kotor (*output*) dan biaya produksi (*input*) yang dihitung per bulan, per musim, dan per tahun. Pendapatan luar usahatani adalah pendapatan yang diperoleh sebagai akibat melakukan kegiatan diluar usahatani, seperti berdagang, mengojek, kuli, dan sebagainya.

#### a. Pendapatan Rumahtangga

Menurut Mosher (1987), tolok ukur yang sangat penting untuk melihat kesejahteraan nelayan adalah pendapatan rumahtangga, karena beberapa aspek dari kesejahteraan tergantung pada tingkat pendapatan. Besarnya pendapatan akan mempengaruhi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan lapangan kerja.

##### (1) Pendapatan Usaha Ikan Tangkap

Dalam pendapatan usaha ikan tangkap ada dua unsur yang digunakan, yaitu unsur penerimaan dan pengeluaran dari usahatani tersebut. Penerimaan adalah hasil perkalian antara jumlah produk

total dengan satuan harga jual, sedangkan pengeluaran atau biaya dimaksudkan sebagai nilai penggunaan sarana produksi dan lain-lain yang dikeluarkan pada proses produksi (Gustiyana, 2004).

Menurut Mubyarto (1989), produksi berkaitan dengan penerimaan dan biaya produksi. Penerimaan tersebut diterima nelayan karena masih harus dikurangi dengan biaya produksi, yaitu keseluruhan biaya yang dipakai dalam proses produksi.

Pendapatan usahatani menurut Gustiyana (2004) dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu (1) penerimaan, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh dalam usaha selama satu tahun yang dapat dihitung dari hasil penjualan atau pertukaran hasil produksi dan dinilai dalam rupiah berdasarkan harga per satuan berat pada saat pemungutan hasil, (2) pendapatan bersih, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi dengan biaya produksi selama proses produksi. Biaya produksi meliputi biaya riil tenaga kerja dan biaya riil sarana produksi.

Menurut Hernanto (1994), ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha nelayan, yaitu:

- (a) luas usaha, meliputi ukuran kapal, jarak berlayar, dan waktu berlayar,
- (b) tingkat produksi, yang diukur lewat produktivitas per tahun,
- (c) pilihan dan kombinasi alat tangkap yang digunakan,
- (d) efisiensi tenaga kerja.

Menurut Soekartawi (1995), biaya usahatani adalah semua pengeluaran yang dipergunakan dalam usahatani. Biaya usahatani dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang akan dihasilkan, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh volume produksi. Secara matematis pendapatan usaha ikan tangkap dapat dihitung dengan rumus (Soekartawi, 1995):

$$\pi = Y \cdot P_y - \sum X_i \cdot P_{xi} - BTT \dots\dots\dots(5)$$

Keterangan :  $\pi$  = Pendapatan (Rp)  
 $Y$  = Hasil produksi (Kg)  
 $P_y$  = Harga hasil produksi (Rp)  
 $X_i$  = Faktor produksi variabel ( $i = 1, 2, 3, \dots, n$ )  
 $P_{xi}$  = Harga faktor produksi variabel ke- $i$  (Rp)  
 $BTT$  = Biaya tetap total (Rp)

## (2) Pendapatan Lain-Lain

Sumber pendapatan keluarga digolongkan menjadi dua sektor, yaitu sektor pertanian (*on farm*) dan non pertanian (*non farm*).

Sumber pendapatan dari sektor pertanian dapat dirinci lagi menjadi pendapatan nelayan dan pendapatan usaha pertanian yang bukan nelayan. Sumber pendapatan dari sektor non pertanian dibedakan menjadi pendapatan dari industri keluarga, perdagangan, pegawai, jasa, dan buruh non pertanian. Tingkat pendapatan rumahtangga merupakan indikator yang penting untuk mengetahui tingkat hidup rumahtangga. Tingkat pendapatan tersebut diduga dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar rumahtangga (Sajogyo, 1997).

### (3) Manfaat Ekonomi Koperasi

Pelayanan koperasi kepada anggota adalah jasa yang diberikan koperasi dalam memajukan usaha anggotanya. Sebagian koperasi adalah pemberi pelayanan yang bertugas memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada usaha anggotanya. Munkner (1997) menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan koperasi maka prioritas yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, pertumbuhan koperasi yang berkesinambungan bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan pembenaran dalam kaitan dengan perbaikan kapasitas koperasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, koperasi harus mewujudkannya melalui penyediaan barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan anggota dengan penawaran harga, kualitas dan kondisi yang lebih menguntungkan anggota dari pada penawaran yang ditawarkan oleh pasar untuk memberikan pelayanan yang baik kepada anggota.

Karakteristik yang harus dimiliki oleh koperasi agar dapat disebut sebagai pusat pelayanan, menurut Nasution (1990) adalah:

- (a) mampu menyediakan sarana dan bahan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kodrat sebagai manusia, baik untuk kebutuhan konsumsi, maupun untuk kegiatan produksi,
- (b) mampu berperan untuk membangkitkan inisiatif lokal agar semua masyarakat dapat meningkatkan peran sertanya dalam

proses pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut,

- (c) dapat berperan sebagai sarana dalam proses transformasi struktural termasuk redistribusi faktor-faktor produksi dan pendapatan.

Pelayanan yang baik dari koperasi akan meningkatkan partisipasi anggota. Demikian pula koperasi sebagai organisasi ekonomi merupakan wadah berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya para produsen, bisa diterima oleh anggota karena adanya pelayanan yang diberikan sesuai dengan bentuk dan kebutuhan yang diberikan oleh anggota, sehingga dapat meningkatkan partisipasi anggota. Semakin besar manfaat ekonomi koperasi yang diterima anggota, maka semakin besar pula pendapatan rumahtangga yang mereka terima.

Pendapatan rumahtangganelayan anggota koperasimerupakan penjumlahan dari pendapatan keluarga dari usaha ikan tangkap dan pendapatan keluarga yang berasal dari luar usaha ikan tangkap, dan dirumuskan (Soekartawi, 1995):

$$P_{rt} = P_{\text{usaha ikan tangkap}} + P_{\text{lain-lain}} + P_{\text{manfaat ekonomi koperasi}} \dots (6)$$

Keterangan:

$P_{rt}$  = Pendapatan rumahtangga  
 $P_{\text{usaha ikan tangkap}}$  = Pendapatan dari usaha ikan tangkap  
 $P_{\text{lain-lain}}$  = Pendapatan luar usaha ikan tangkap dan luar koperasi  
 $P_{\text{manfaat ekonomi}}$  = Manfaat ekonomi koperasi

Pendapatan nelayan dialokasikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga. Menurut teori Maslow manusia mempunyai lima kebutuhan yang membentuk tingkatan-tingkatan atau disebut juga hirarki dari yang paling penting hingga yang tidak penting dan dari yang mudah hingga yang sulit untuk dicapai atau didapat.

Lima kebutuhan dasar Maslow disusun berdasarkan kebutuhan yang paling penting hingga yang tidak terlalu krusial, yaitu:

- (a) kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, contoh: sandang / pakaian, pangan / makanan, papan / rumah, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan lain sebagainya,
- (b) kebutuhan keamanan dan keselamatan, yaitu kebutuhan dalam memperoleh keamanan dan keselamatan, contoh: bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan lain sebagainya,
- (c) kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan dalam memperoleh kasih sayang dari lingkungan sekitar dan rasa saling memiliki, contoh: memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lain,
- (d) kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan dalam memperoleh penghargaan, contoh : pujian, piagam, tanda jasa, hadiah, dan banyak lagi lainnya,

- (e) kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan dan keinginan untuk bertindak sesuka hati sesuai dengan bakat dan minatnya., contoh: berkreasi, mencoba hal baru, dan lain-lain.

Menurut Soekirno (1985), ukuran pendapatan yang digunakan untuk tingkat kesejahteraan keluarga adalah pendapatan rumahtangga yang diperoleh dari bekerja. Tiap anggota keluarga berusia kerja di dalam rumahtangga akan terdorong bekerja untuk kesejahteraan keluarganya. Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa anggota keluarga, seperti istri dan anak-anak, adalah penyumbang dalam berbagai kegiatan, baik dalam pekerjaan rumahtangga, maupun mencari nafkah.

Mosher (1987) berpendapat bahwa tolok ukur yang penting dalam melihat kesejahteraan petani dan nelayan adalah pendapatan rumahtangga, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan tergantung pada tingkat pendapatan. Besarnya pendapatan akan mempengaruhi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Tingkat pendapatan rumahtangga merupakan indikator penting untuk mengetahui tingkat hidup rumahtangga.

#### b. Pengeluaran Rumahtangga

Menurut Badan Pusat Statistik (2007), pengeluaran keluarga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran

keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya relatif lebih rendah dibanding elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan.

Umumnya, tingkat kehidupan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari pola pengeluaran keluarga, yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran untuk kebutuhan pangan dan non pangan. Tingkat pengeluaran masyarakat tersebut dibedakan satu sama lain. Perbedaan tersebut berdasarkan golongan tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan status sosial. Pengeluaran keluarga nelayan pada dasarnya adalah pengeluaran produktif dan konsumtif, yang sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan (Badan Pusat Statistik, 2007).

## **7. Kesejahteraan Anggota**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 1974, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Mosher

(1987) menjelaskan bahwa yang paling penting dari kesejahteraan nelayan adalah pendapatan rumahtangga, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan keluarga tergantung pada tingkat pendapatan rumahtangga.

Sajogyo (1997) menjelaskan kriteria kesejahteraan didasarkan pada pengeluaran per kapita per tahun setara beras, dikategorikan miskin apabila pengeluarannya lebih rendah nilai tukar 320 kg beras untuk daerah pedesaan, miskin sekali apabila pengeluarannya lebih rendah dari nilai tukar 240 kg beras untuk daerah pedesaan, dan paling miskin apabila pengeluaran per kapita per tahun lebih rendah dari nilai tukar 180 kg beras untuk daerah pedesaan. Pengukuran tingkat kesejahteraan kriteria Sajogyo (1997) adalah pendekatan dengan pengeluaran rumahtangga yang terdiri dari pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan. Pengukuran ini dilakukan dengan cara menghitung kebutuhan harian, mingguan, dan bulanan. Total pengeluaran rumahtangga dapat diformulasikan sebagai:

$$C_t = C_a + C_b \dots \dots \dots (7)$$

$$C_a = C_{a1} + C_{a2} + C_{a3} + C_{a4} + C_{a5} + \dots + C_{an} \dots \dots \dots (8)$$

$$C_b = C_{b1} + C_{b2} + C_{b3} + C_{b4} + C_{b5} + \dots + C_{bn} \dots \dots \dots (9)$$

Keterangan :	$C_t$	= Total pengeluaran rumahtangga
	$C_a$	= Pengeluaran untuk pangan
	$C_b$	= Pengeluaran untuk non pangan
	$C_{a1}$	= Pengeluaran untuk padi-padian
	$C_{a2}$	= Pengeluaran untuk minyak dan lemak
	$C_{a3}$	= Pengeluaran untuk pangan hewani
	$C_{a4}$	= Pengeluaran untuk sayur-sayuran
	$C_{a5}$	= Pengeluaran untuk buah-buahan
	$C_{an}$	= Pengeluaran lainnya
	$C_{b1}$	= Pengeluaran untuk bahan bakar
	$C_{b2}$	= Pengeluaran untuk aneka barang/jasa
	$C_{b3}$	= Pengeluaran untuk pendidikan
	$C_{b4}$	= Pengeluaran untuk kesehatan
	$C_{b5}$	= Pengeluaran untuk listrik
	$C_{bn}$	= Pengeluaran lainnya

Pengeluaran rumahtangga per kapita per bulan adalah total pengeluaran rumahtangga, baik pengeluaran untuk pangan maupun non pangan dalam sebulan. Usaha ikan tangkap memiliki tiga musim, sehingga pengeluaran rumahtangga juga harus dikonversikan pada setiap musim. Setelah pengeluaran rumahtangganelayan dikonversikan pada setiap musim. Selanjutnya, seluruh pengeluaran pada setiap musim dijumlahkan, sehingga menjadi pengeluaran rumahtangga per tahun. Pengeluaran rumahtangga per tahun tersebut dibagi dengan jumlah tanggungan rumahtangga dan diperoleh pengeluaran rumahtangga per kapita per tahun.

Menurut Sajogyo (1997), pengeluaran rumahtangga dibedakan atas pengeluaran pangan dan nonpangan. Komoditas makanan terdiri dari padi-padian dan hasil-hasilnya, umbi-umbian dan hasil-hasilnya, minyak dan lemak, pangan hewani, buah atau biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lainnya. Komoditas bukan makanan terdiri dari pendidikan, pakaian, kesehatan, kebersihan, kosmetik, sosial, tabungan, arisan, dan cicilan, sumbangan, rekreasi, perbaikan rumah, transportasi, listrik, telepon atau handphone, perabotan rumah, aksesoris, dan bahan bakar.

Pengeluaran rumahtangga per kapita per tahun kemudian dibagi dengan harga beras per kilogram untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumahtangga nelayan. Menurut Sajogyo (1997), secara matematis tingkat pengeluaran per kapita per tahun pada rumahtangganelayan dan tingkat pengeluaran per kapita per tahun setara beras dapat dirumuskan sebagai:

$$\text{Pengeluaran Per Kapita/Tahun (Rp)} = \frac{\text{Pengeluaran RT/Tahun (Rp)}}{\text{Jumlah Tanggungan Keluarga}} \dots\dots\dots(8)$$

$$\text{Pengeluaran/Kapita/Tahun Setara Beras (Kg)} = \frac{\text{Pengeluaran /Kapita /Tahun (Rp)}}{\text{Harga Beras (Rp/Kg)}} \dots\dots\dots(9)$$

Kriteria kesejahteraan menurut Sajogyo (1997) yang didasarkan pada besarnya pengeluaran per kapita per tahun diukur dengan harga atau nilai beras setempat pada daerah pedesaan dan perkotaan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kriteria kesejahteraan menurut Sajogyo (1997) berdasarkan besaran pengeluaran per kapita per tahun setara beras pada daerah pedesaan dan perkotaan

Kriteria	Desa (kg)	Kota (kg)
Paling miskin	< 180	< 240
Miskin sekali	180 – 240	240 – 360
Miskin	> 240 – 320	> 360 – 480
Nyaris miskin	> 320 – 480	-
Cukup	> 480 – 960	> 480 – 960
Hidup layak	> 960	> 960

Sumber : Nurmanaf, 2006 (data diolah)

Badan Pusat Statistik (2007) menjelaskan kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumahtangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat melalui suatu aspek tertentu. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat dapat diamati dari berbagai aspek yang spesifik, yaitu:

a. Kependudukan

Penduduk merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan, karena dengan kemampuannya mereka dapat mengelola sumberdaya alam sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup bagi diri sendiri dan keluarganya secara berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan, jika kualitasnya rendah. Oleh sebab itu, dalam menangani masalah kependudukan, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusianya. Di samping itu, program perencanaan pembangunan sosial disegala bidang harus mendapat prioritas utama untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

b. Kesehatan dan Gizi

Kesehatan dan gizi merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik. Kesehatan dan gizi berguna untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan, dan jenis pengobatan yang dilakukan.

c. Pendidikan

Maju tidaknya suatu bangsa terletak pada kondisi tingkat pendidikan masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin maju bangsa tersebut. Pemerintah berharap tingkat

pendidikan anak semakin membaik dan tentunya akan berdampak padatingkat kesejahteraan penduduk.

d. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjukkan masyarakat dengan indikator keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan, diantaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

e. Konsumsi atau Pengeluaran Rumahtangga

Pengeluaran rumahtangga juga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk.

Semakin tinggi pendapatan, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan.

Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

f. Perumahan dan Lingkungan

Manusia membutuhkan rumah di samping sebagai tempat untuk berteduh atau berlindung dari hujan dan panas juga menjadi tempat berkumpulnya para penghuni yang merupakan satu ikatan keluarga.

Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumahtangga, dimana kualitas dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumahtangga tersebut diantaranya dapat terlihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, dan fasilitas tempat

buang air besar. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

g. Sosial, dan lain-lain

Indikator sosial lainnya yang mencerminkan kesejahteraan adalah persentase penduduk yang melakukan perjalanan wisata, persentase penduduk yang menikmati informasi dan hiburan meliputi menonton televisi, mendengarkan radio, membaca surat kabar, dan mengakses internet. Selain itu, persentase rumah tangga yang menguasai media informasi seperti telepon, handphone, dan komputer, serta banyaknya rumah tangga yang membeli beras murah/miskin (*raskin*) juga dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan.

Badan Pusat Statistik (2007) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Inti dari teori kemiskinan ini adalah membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan Garis Kemiskinan (GK) yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi per orang per bulan. Garis kemiskinan, yakni kebutuhan dasar makanan setara 2100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok.

Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur tingkat kemiskinan. Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, dapat dihitung dengan menggunakan *headcount index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Tingkat kemiskinan merupakan indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sukirno (1985) menyatakan bahwa kesejahteraan adalah suatu yang bersifat subjektif dimana setiap orang mempunyai pedoman, tujuan dan cara hidup yang berbeda-beda pula terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Maslow (1984) menyebutkan bahwa terdapat lima kelompok kebutuhan yang membentuk suatu hirarki dalam mencapai kesejahteraan, yaitu (1) kebutuhan fisiologis yaitu pangan, sandang, dan papan, (2) kebutuhan sosial, (3) kebutuhan akan harga diri, (4) pengakuan kesepakatan dari orang lain, dan (5) kebutuhan akan pemenuhan diri.

Rodjak (2002) menjelaskan yang dimaksud dengan pendapatan rumahtangga nelayan adalah jumlah pendapatan dari usaha ikan tangkap dan dari luar usaha ikan tangkap, yang diperoleh dalam setahun. Soekirno (1985) menyebutkan bahwa terdapat empat ukuran pendapatan:

a. Pendapatan kerja nelayan

Pendapatan ini diperoleh dengan menghitung semua penerimaan dan kenaikan investasi yang dikurangi dengan pengeluaran baik tunai maupun bunga modal, dan investasi nilai kerja keluarga.

b. Penghasilan kerja nelayan

Pendapatan ini diperoleh dari selisih total penerimaan usaha ikan tangkapdikurangi dengan bunga modal.

c. Pendapatan kerja keluarga

Pendapatan yang diperoleh dari balas jasa dan kerja serta pengelolaan yang dilakukan nelayan dan anggotanya yang bertujuan untuk menambah penghasilan rumahtangga.

d. Pendapatan keluarga

Pendapatan ini diperoleh dengan menghitung pendapatan dari sumber-sumber lain yang diterima nelayan bersama keluarga di samping kegiatan pokoknya

## **B. Kajian Penelitian Terdahulu**

Peneliti harus mempelajari penelitian sejenis di masa lalu untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu akan memberikan gambaran kepada penulis tentang penelitian sejenis yang sudah dilakukan, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penulis. Kajian terhadap penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tinjauan penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitiannya sebelumnya dalam hal metode, waktu, dan tempat penelitian. Peneliti harus mempelajari penelitian sejenis di masa lalu untuk mendukung penelitian yang dilakukan.

Tabel 4. Ringkasan beberapa penelitian terdahulu mengenai analisis kinerja koperasi, evaluasi kinerja, dan kesejahteraan anggota

No	Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil
1	Djumahir (2001)	Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) di Kota Madya Malang <a href="http://library.um.ac.id/majalah/printmajalah.php/315.html">library.um.ac.id/majalah/printmajalah.php/315.html</a>	Metode Analisis Diskriminan	Rasio likuiditas dari KP-RI di Kotamadya Malang adalah 1.190 %, berada diatas ketentuan Kantor Depertemen Koperasi dan PPK Kotamadya Malang sebesar 125%, disebabkan karena kebanyakan KP-RI bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sehingga banyak modal yang tertanam dalam aktiva lancar. Rasio rentabilitas untuk <i>gross profit margin</i> adalah 6% dan <i>return on assets</i> adalah 9% berada di bawah rata-rata yang ditentukan yaitu 10%, sedangkan besar <i>profit margin on sales</i> adalah 39,8% dan <i>return on equity</i> adalah 13,1% yang berada di atas standar.

---

2	Dwi (2013)	Optimalisasi Peran Koperasi Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Wanita Potre Koneng Kabupaten Sumenep ( <a href="http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article">http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article</a> )	Metode Analisis Deskriptif Kualitatif	Keberadaan Koperasi Wanita Potre Koneng yang dirasa oleh masyarakat luar kurang menyentuh karena usaha toko yang hanya untuk anggota dan lokasi kantor yang tidak diberi reklame penunjuk informasi. Secara lingkungan memang Koperasi Wanita Potre Koneng kurang menyentuh masyarakat luar, tetapi dilihat dari sisi modal yang setiap tahun semakin bertambah mencapai 5 milyar rupiah dan berdampak pada aset yang dimiliki juga meningkat 2 milyar. Hal ini menjadi motivasi bagi Koperasi Wanita Potre Koneng sebagai upaya/langkah untuk lebih mengoptimalkan peran dari Koperasi Wanita Potre Koneng.
3	Fadli (2012)	Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Karyawan Kantor Kementerian Agama Karawang ( <a href="http://jurnal.feunsika.ac.id/">jurnal.feunsika.ac.id/</a> )	Metode Analisis Deskriptif	Perbandingan rasio pada Koperasi Karyawan Kantor Kementerian Agama Karawang mengalami penurunan pada tingkat likuiditas koperasi sebesar 41,71% dari tahun 2010 ke tahun 2011, pada tingkat solvabilitas mengalami penurunan sebesar 0,19% dari tahun 2010 ke tahun 2011, dan pada tingkat <i>operating rati</i> mengalami kenaikan sebesar 5,40% dari tahun 2010 ke tahun 2011.

---

---

4	Hardiningsih (2009)	Analisis Laporan Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad) Kartika Benteng Sejahtera di Kota Balikpapan <a href="http://journal.feunmul.in/ojs/index.php/publikasi_ilmiah/article/view/97">journal.feunmul.in/ojs/index.php/publikasi_ilmiah/article/view/97</a>	Metode Analisis Deskriptif	Rasio likuiditas dari koperasi mengalami penurunan di setiap tahunnya tetapi masih dapat dinilai cukup baik, sedangkan rasio solvabilitas mengalami peningkatan di setiap tahunnya yang menunjukkan jumlah hutang primer koperasi terus mengalami penurunan. Selanjutnya, rasio profitabilitas dan aktivitas koperasi menunjukkan hasil yang baik, namun masih jauh di bawah standar penilaian koperasi berprestasi.
5	Hendrik (2011)	Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau Pulau Besar dan Danau Bawah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau <a href="http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JPK/article/view/44">ejournal.unri.ac.id/index.php/JPK/article/view/44</a>	Metode tabulasi dan Deskriptif	Berdasarkan kriteria UMR didapat bahwa seluruh nelayan mempunyaipendapatan di atas UMR, tetapi berdasarkan Bappenas sebanyak 4 rumahtangga nelayan tidak sejahtera, dan menurut BPS sebanyak 6 rumah tangga responden termasuk ke dalam rumah tangga tidak sejahtera.

---

6	Iqbal (2014)	Analisis Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Ubi Kayu di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur	Analisis deskriptif dan analisis statistik	Pendapatan rumah tanggapada petani ubikayu di Kecamatan Sukadana Lampung Timur bersumber dari pendapatan usahatani ( <i>on farm</i> ), kegiatan pertanian di luar <i>on farm</i> ( <i>off farm</i> ) dan aktivitas di luar kegiatan pertanian ( <i>non farm</i> ).Rata-rata pendapatan rumah tangga petani ubikayu sebesar Rp27.126.481,25/tahun.
7	Mahri (2010)	Pelayanan dan Manfaat Koperasi, serta Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kabupaten Tasikmalaya ( <a href="http://jurnal.upi.edu/ekonomi/view/594">http://jurnal.upi.edu/ekonomi/view/594</a> )	Metode Survey Deskriptif	Kualitas pelayanan dan manfaat koperasi berpengaruh positif terhadap partisipasi anggota pada Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Tasikmalaya.
8	Mulyadi (2013)	Analisis Rasio Keuangan Pada Koperasi Karyawan Aneka Pangan Nusantara (KOPKANUS) PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Purwakarta ( <a href="http://jurnal.feunsika.ac.id/wp-content/uploads/2013/06">jurnal.feunsika.ac.id/wp-content/uploads/2013/06</a> )	Metode Analisis Deskriptif	Kinerja keuangan koperasi dinilai dengan metode <i>time series</i> menunjukkan progres hampir semua rasio baik, hanya ada 2 dari 14 rasio yang dianalisis kurang baik, yaitu <i>Long Term Debt Ratio</i> dan <i>Gross Profit Margin</i> .

---

9	Munir (2012)	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam "Cendrawasih" Kecamatan Gubug Tahun Buku 2011 <a href="http://jurnal.widyamanggala.ac.id/index.php/wmkeb/article/view/72">http://jurnal.widyamanggala.ac.id/index.php/wmkeb/article/view/72</a>	Metode Deskriptif Kualitatif	Penilaian kesehatan Koperasi Cendrawasih Kecamatan Gubug tahun 2011 adalah cukup sehat, hal ini dapat dilihat dari perhitungan penilaian kesehatan berdasarkan tujuh aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi yang skor akhir dari ketujuh aspek sebesar 60,2 dengan predikat cukup sehat menurut kriteria SK Menteri No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008.
10	Prawitasari (2013)	Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau dari Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas di KUD Musuk Kabupaten Boyolali	Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif	Kondisi keuangan KUD Musuk dilihat dari likuiditas (rasio lancar dan rasio cepat) dan solvabilitas menunjukkan posisi yang baik karena memenuhi standar, sedangkan ditinjau dari rentabilitas (ROI dan ROE) menunjukkan nilai positif yang menunjukkan sudah dapat menghasilkan laba.

---

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian Prawitasari (2013), metode yang digunakan untuk mengukur kinerja koperasi sebagai badan usaha adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan analisis rasio keuangan, sementara metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana penulis juga menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja koperasi sebagai badan usaha, tetapi KUD Mina Jaya telah melakukan analisis rasio keuangan, sehingga penulis dapat merujuk hasil analisis tersebut dan menghitung kembali nilai rasio keuangannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian Djumahir (2001), pengukuran kesehatan koperasi dilakukan dengan menggunakan metode analisis diskriminan yaitu menggunakan variabel-variabel pembeda untuk membedakan kinerja dua jenis koperasi yang berbeda. Pada penelitian Hendrik (2011), pengukuran tingkat kesejahteraan nelayan menggunakan teori Badan Pusat Statistik (2007) dengan acuan nilai upah minimum regional (UMR) setempat, sedangkan pada penelitian ini, tingkat kesejahteraan nelayan diukur menggunakan teori Sajogyo, yaitu berdasarkan pengeluaran per kapita per tahun setara beras, dan pengukuran keberhasilan koperasi dianalisis dengan menggunakan pendekatan *tripartite*.

Keunggulan penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini aspek yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu koperasi tidak hanya satu aspek, yaitu kesehatan keuangan koperasi saja, melainkan menggunakan tiga aspek pendekatan menurut Hanel (1989), yaitu

keberhasilan koperasi menjadi suatu badan usaha, keberhasilan koperasi dalam berkontribusi terhadap pembangunan, dan keberhasilan koperasi dalam menyejahterakan anggota. Hal ini dilakukan penulis dengan pertimbangan bahwa tujuan utama koperasi adalah menyejahterakan anggota, sehingga dari penelitian ini dapat dilihat apakah anggota sudah merasa sejahtera ketika mereka menjadi anggota koperasi.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan hasil perikanan. Menurut Anggaran Dasar KUD Mina Jaya, lebih dari 3.000 orang nelayan tergabung dalam keanggotaan KUD Mina Jaya Kota Bandar Lampung. Koperasi dijadikan suatu media untuk memasarkan hasil dan membeli sesuatu yang menjadi kebutuhan nelayan, sehingga koperasi memiliki berbagai unit usaha yang digunakan untuk melayani anggota. Akan tetapi, setiap koperasi memerlukan analisis keberhasilan untuk melihat keberhasilan koperasi dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan pendekatan *tripartite*, keberhasilan koperasi dinilai dari tiga aspek, yaitu keberhasilan koperasi ketika menjadi badan usaha, kontribusi koperasi terhadap pembangunan, dan peran koperasi terhadap kesejahteraan anggota.

Koperasi sebagai badan usaha dapat dinilai keberhasilannya menggunakan analisis kinerja keuangan koperasi melalui analisis rasio. Kinerja keuangan pada suatu koperasi dapat diketahui berdasarkan keadaan laporan keuangannya yang terdiri dari neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal pada setiap periodenya. Komponen pada laporan rugi laba

salah satunya adalah pendapatan koperasi. Jumlah pendapatan koperasi sangat dipengaruhi oleh partisipasi anggota koperasi itu sendiri.

Peran koperasi pada kesejahteraan anggota dapat diketahui berdasarkan jumlah manfaat ekonomi, pendapatan nelayan, dan pendapatan non koperasi dan nelayan. Peran koperasi terhadap pembangunan merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi keberhasilan koperasi. Bentuk kontribusi koperasi terhadap pembangunan dapat dilihat dari ketaatan koperasi dalam membayar pajak, seberapa besar koperasi menyerap tenaga kerja, dan rasio tingkat upah karyawan.

Anggota dari KUD Mina Jaya bekerja sebagai nelayan, baik sebagai juragan kapal, nahkoda, kepala kamar mesin (KKM), ataupun sebagai anak buah kapal (ABK) pada kapal yang berbeda-beda ukurannya. Terdapat dua golongan kapal yang digunakan oleh para nelayan, yaitu golongan kapal besar yang menggunakan ABK lebih dari 10 orang dan golongan kapal kecil yang menggunakan ABK kurang dari 10 orang.

Menurut Soekartawi (1995), pendapatan usahatani perikanan dapat diketahui dari selisih antara penerimaan dan biaya total. Penerimaan usahatani merupakan selisih antara penerimaan dan biaya. Biaya usahatani adalah semua pengeluaran yang dipergunakan dalam usahatani. Biaya usahatani dibedakan menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap (*fixed cost*) adalah biaya yang besarnya tidak tergantung kepada besar kecilnya produksi yang akan dihasilkan, biaya tidak tetap (*variabel cost*)

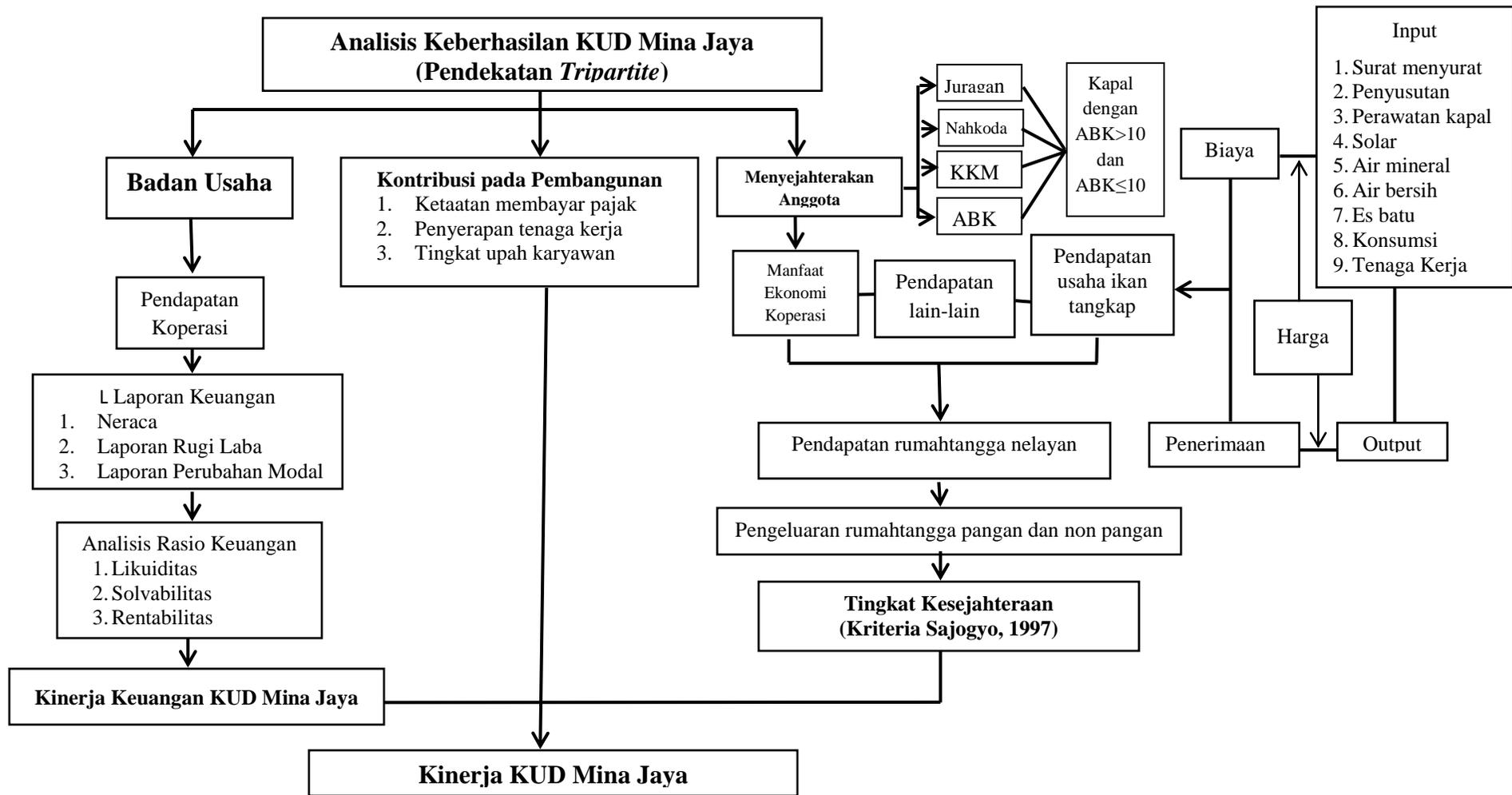
adalah biaya yang besar kecilnya produksi yang akan dihasilkan dipengaruhi oleh volume produksi.

Rincian jenis biaya tetap usaha perikanan adalah surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), surat izin berlayar (Pas biru), biaya perawatan kapal dan mesin alat tangkap, dan biaya penyusutan aset tetap. Selanjutnya, rincian biaya variabel usaha perikanan adalah solar, kayu bakar, air bersih, air mineral, tenaga kerja, dan konsumsi saat melaut (Effendi dan Oktariza, 2006).

Tingkat kesejahteraan rumahtangga dapat dilihat dari pola pengeluaran rumahtangga tersebut yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran untuk kebutuhan pangan dan non pangan, dimana persentasi untuk pangan cenderung akan semakin kecil. Kedua pengeluaran tersebut merupakan total pengeluaran rumahtangga. Tingkat pengeluaran rumahtangga berbeda satu sama lain didasarkan pada golongan tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, status sosial, dan prinsip pangan. Setelah jumlah pendapatan dan pengeluaran rumahtangga diketahui dapat dihitung besarnya pendapatan dan pengeluaran per kapita per tahun.

Besarnya pendapatan dan pengeluaran ditambah indikator lainnya termasuk di dalamnya kondisi sosial ekonomi merupakan dasar untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumahtangga nelayan berdasarkan kriteria kemiskinan dari Sajogyo yaitu mengenai pengeluaran rumahtangga yang disetarakan dengan pengeluaran beras per kapita per tahunnya.

Kerangka berpikir pada analisis keberhasilan KUD Mina Jaya Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut



Gambar 2. Bagan alir kerangka berpikir analisis keberhasilan KUD Mina Jaya berdasarkan pendekatan *tripartite*

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis hanya dikhususkan untuk analisis uji beda pada tujuan ke tiga, yaitu:

1. Diduga terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kesejahteraan juragan, nahkoda, KKM, dan ABK pada kapal dengan  $ABK > 10$  orang dengantingkat kesejahteraan juragan, nahkoda, KKM, dan ABK pada kapal dengan  $ABK \leq 10$  orang.